

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

¹**Anando Ridho Raschani**

(Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)

Email Koresponden: anandoridho416@gmail.com

²**Rudolf Hizkia Simangunsong**

(Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)

³**Muhammad Fajri Noer Syahbani**

(Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)

⁴**Rimi Gusliana Mais**

(Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, SAP berbasis akrual, kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah, transparansi, akuntabilitas

Keywords: *Government Accounting System, accrual-based SAP, quality of financial statements, local government, transparency, accountability*

Received : 27 Februari 2026

Revised : 08 Maret 2026

Accepted: 20 Maret 2026

©2026The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan daerah, APBD, serta peraturan terkait SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan antarperiode. Meskipun demikian, penerapan SAP masih menghadapi beberapa kendala, seperti pengelolaan aset yang belum optimal, pencatatan transaksi yang belum konsisten, serta sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi secara maksimal. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi, tetapi juga oleh efektivitas sistem, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the implementation of the Government Accounting System (SAP) on the quality of the financial statements of the DKI Jakarta Provincial Government. The study employs a descriptive qualitative method utilizing secondary data in the form of regional financial statements, the Regional Budget (APBD), and regulations related to SAP. The results indicate that the implementation of an accrual-based SAP can help improve the quality of financial statements because the information presented becomes more relevant, reliable, easy to understand, and comparable across periods. However, the implementation of SAP still faces several challenges, such as suboptimal asset management, inconsistent transaction recording, and an accounting information system that is not yet fully integrated. Therefore, the quality of financial statements is influenced not only by the application of accounting standards but also by the effectiveness of the system, internal controls, and the competence of local government officials.

I. PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman pokok untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, sebanding, dan mudah dipahami oleh para stakeholder. Dalam kondisi yang sempurna, penerapan SAP secara maksimal seharusnya memproduksi laporan keuangan untuk daerah yang sangat berkualitas serta mampu mencerminkan keadaan keuangan dengan tepat sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SAP di tingkat pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat beberapa catatan mengenai kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, pencatatan transaksi, serta sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antara kondisi ideal penerapan SAP dan praktik yang berlangsung di lapangan. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024; Yusuf & Lestari, 2020).

Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah diterapkan secara resmi. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, tetapi di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya tenaga kerja terampil, sistem informasi yang belum maksimal, dan tingginya tingkat kompleksitas transaksi keuangan, terutama di daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang sangat aktif. (Mahmudi, 2019; Rahmawati, 2021; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Meskipun telah banyak penelitian terkait penerapan SAP, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pada pemerintah daerah dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti Provinsi DKI

Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya research gap dalam literatur, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada konteks daerah metropolitan dengan karakteristik transaksi yang kompleks. Selain itu, masih terdapat research gap lainnya berupa minimnya penelitian yang secara langsung mengaitkan implementasi SAP dengan indikator kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. (Hidayat & Putri, 2021; Wibowo & Rahmawati, 2020; Kurniawan, 2022; Tarigan et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Hidayat dan Putri (2021) menyatakan bahwa implementasi SAP berbasis akrual mampu meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan. Sementara itu, Sari dan Taufik (2022) menemukan bahwa tingkat pemahaman aparatur terhadap SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta sistem pendukung yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menjadi penting karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berperan besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, analisis terhadap penerapan SAP menjadi krusial untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022; Rahmawati, 2021; Harun, 2019).

Kontribusi penting dari penelitian ini adalah memberikan bukti nyata tentang dampak penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap mutu laporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki efektivitas penerapan SAP dan memberikan sumbangan dalam pengembangan literatur akuntansi untuk sektor publik, terutama yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. (Hidayat & Putri, 2021; Wibowo & Rahmawati, 2020; Wardani & Aripriatiwi, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis fenomena berdasarkan data yang ada, bukan pada pengujian hubungan statistik antar variabel. Dengan metode ini, diupayakan untuk memahami cara penerapan standar akuntansi dalam praktik dan bagaimana kualitas laporan keuangan dapat ditafsirkan berdasarkan dokumen yang tersedia. Metode kualitatif juga memberi kesempatan untuk

mengkaji fenomena dalam konteks, terutama di lingkungan pemerintahan daerah yang sangat kompleks.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang besar serta tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp83,7 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan skala aktivitas keuangan yang signifikan dan membutuhkan sistem akuntansi yang terstruktur dan andal. (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023).

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang didapatkan melalui analisis dokumen. Data sekunder tersebut mencakup laporan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan pelaksanaan anggaran, serta berbagai aturan yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademis seperti jurnal dan buku sebagai dasar teori dalam menganalisis informasi. Informasi sekunder dipilih karena bisa memberikan gambaran yang objektif tentang keadaan keuangan daerah serta pelaksanaan SAP tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas para responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen yang dianalisis meliputi struktur APBD, laporan realisasi anggaran, serta laporan hasil pemeriksaan yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan dapat diverifikasi kebenarannya. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Langkah awal analisis adalah mengurangi data, yaitu memilih dan menyaring informasi yang berkaitan dengan inti penelitian. Kemudian, data disusun dalam bentuk narasi yang teratur untuk menjelaskan bagaimana SAP diterapkan dan kualitas laporan keuangannya. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dengan cara memahami data secara keseluruhan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang ada dalam data tersebut. Metode ini membantu kami untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti.

Untuk memastikan keabsahan data, studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai dokumen resmi dan sumber literatur yang relevan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kevalidan hasil penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada penafsiran terhadap data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan dapat dipercaya. Dengan kemampuan anggaran yang besar dan banyaknya transaksi keuangan yang rumit, pemerintah daerah membutuhkan sistem akuntansi yang dapat mencatat dan menyajikan informasi keuangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu, penggunaan akuntansi berbasis akrual membantu pemerintah daerah dalam memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih lengkap. Informasi yang dihasilkan tidak hanya mencakup kas, tetapi juga aset, utang, dan perubahan kekayaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan efek positif terhadap peningkatan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan cara pencatatan yang lebih komprehensif, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan dengan lebih terbuka kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Keterbukaan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, penerapan akuntansi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, penerapan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola aset dengan lebih teratur dan terencana. Aset daerah yang sebelumnya sulit dipantau sekarang dapat dicatat dengan lebih rinci, sehingga memudahkan dalam melakukan inventarisasi dan pengawasan. Pengelolaan aset yang baik juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Mardiasmo, 2021; Nordiawan, 2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung implementasi SAP. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah membantu mempercepat proses pencatatan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya dukungan teknologi, proses administrasi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan sistem informasi yang terintegrasi turut membantu meningkatkan kualitas data keuangan daerah. Data yang tersimpan secara digital dapat meminimalisir risiko kehilangan dokumen dan memudahkan proses rekonsiliasi antar unit kerja. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan SAP berbasis akrual juga memberikan manfaat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Informasi keuangan yang tersaji secara lengkap dapat digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian program pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan evaluasi kebijakan secara lebih objektif dan terukur. Dari sisi pengendalian internal, penerapan SAP membantu meningkatkan pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti pendukung dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Peningkatan kualitas laporan keuangan juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang kompeten. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SAP. Selain kompetensi aparatur, koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga menjadi aspek yang sangat penting. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan sinkronisasi data dari berbagai unit kerja sehingga diperlukan komunikasi yang baik antar instansi. Koordinasi yang efektif akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa penerapan SAP telah berjalan dengan cukup baik. Opini tersebut mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah secara umum telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas laporan keuangan yang baik dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Informasi keuangan yang akurat memungkinkan pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penerapan SAP juga memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penerapan SAP memberikan banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah proses integrasi data antar sistem yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga masih menjadi perhatian dalam implementasi SAP. Besarnya jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan sistem pencatatan dan pengawasan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data aset secara berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP juga berperan penting dalam mendukung terciptanya efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem pencatatan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif dan mengurangi risiko pemborosan. Efisiensi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (Fauziah, 2023; Rahmawati, 2021).

POSTUR APBD			
DKI Jakarta			
Tahun 2023			
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Mei 2023, - data diterima SIKD per 05 Mei 2026			
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	74.380,65 M	16.447,01 M	22.11
PAD	52.773,52 M	12.262,98 M	23.24
Pajak Daerah	43.600,00 M	10.666,97 M	24.47
Retribusi Daerah	600,00 M	136,41 M	22.73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542,50 M	281,67 M	51.92
Lain-Lain PAD yang Sah	8.031,02 M	1.177,94 M	14.67
TKDD	18.457,24 M	4.165,25 M	22.57
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.457,24 M	4.165,25 M	22.57
Pendapatan Lainnya	3.149,88 M	18,79 M	0.60
Pendapatan Hibah	3.149,88 M	18,79 M	0.60
Belanja Daerah	74.613,76 M	11.416,47 M	15.30
Belanja Pegawai	18.322,00 M	5.748,66 M	31.38
Belanja Pegawai	18.322,00 M	5.748,66 M	31.38

Sumber: dashboard resmi APBD DKI Jakarta (SMART APBD / SIKD).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu daerah dengan kapasitas keuangan terbesar di Indonesia, yang terlihat dari ukuran APBD dan kerumitan pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2023, APBD DKI Jakarta ditentukan sebesar kurang lebih Rp83,7 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp74,3 triliun dan pembiayaan sebesar Rp9,4 triliun. Ukuran anggaran ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sistem akuntansi yang teratur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Jika dilihat lebih mendalam, sumber pendapatan daerah DKI Jakarta didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52,77 triliun, diikuti oleh pendapatan transfer sebesar Rp18,45 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp3,14 triliun. Sementara itu, pengeluaran daerah direncanakan mencapai Rp74,6 triliun yang terdiri dari pengeluaran operasional, pengeluaran modal, pengeluaran tak terduga, dan pengeluaran transfer. Struktur ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai elemen yang rumit dan memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan konstan. Berdasarkan analisis terhadap data APBD dan laporan keuangan, penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan di DKI Jakarta telah mengikuti prinsip akrual. Penerapan prinsip akrual memungkinkan pengakuan transaksi tidak hanya berdasarkan arus kas, tetapi juga berdasarkan hak dan kewajiban yang ada. Hal ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan keuangan daerah, termasuk aset dan kewajiban yang ada pada pemerintah. Dengan begitu, kualitas informasi keuangan menjadi lebih menyeluruh dan relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. (Kurniawan, 2022).

Selain itu, data realisasi anggaran menunjukkan bahwa pada awal tahun 2023, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp16,4 triliun atau sekitar 22,11% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar Rp11,4 triliun atau sekitar 15,30% dari anggaran. Data ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan anggaran berjalan secara bertahap dan memerlukan pengelolaan

yang cermat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Informasi ini juga mencerminkan pentingnya sistem akuntansi yang mampu mencatat dan memantau realisasi anggaran secara akurat. Dari sisi kualitas laporan keuangan, penerapan SAP berbasis akrual berkontribusi dalam meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang berlaku mampu memberikan informasi yang lebih transparan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Konsistensi penyajian laporan antar periode juga memungkinkan dilakukan analisis kinerja keuangan secara lebih komprehensif. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya perubahan APBD pada tahun 2023 yang mengalami penurunan menjadi sekitar Rp79,52 triliun, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah. Perubahan ini dapat mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran. (Harun, 2019; Bastian, 2021).

Belanja Barang dan Jasa	27.533,46 M	4.776,97 M	17.35
Belanja Barang dan Jasa	27.533,46 M	4.776,97 M	17.35
Belanja Modal	13.703,22 M	138,90 M	1.01
Belanja Modal	13.703,22 M	138,90 M	1.01
Belanja Lainnya	15.055,08 M	751,93 M	4.99
Belanja Bantuan Keuangan	356,45 M	0,00 M	0.00
Belanja Bunga	258,00 M	78,09 M	30.27
Belanja Subsidi	6.016,10 M	181,92 M	3.02
Belanja Hibah	2.963,13 M	354,31 M	11.96
Belanja Bantuan Sosial	4.556,98 M	137,61 M	3.02
Belanja Tidak Terduga	904,43 M	0,00 M	0.00
Pembiayaan Daerah	233,12 M	8.305,29 M	3,562.71
Penerimaan Pembiayaan Daerah	9.400,44 M	8.623,96 M	91.74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977,76 M	8.623,96 M	108.10
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422,68 M	0,00 M	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.167,32 M	318,66 M	3.48
Penyertaan Modal Daerah	7.209,03 M	0,00 M	0.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782,27 M	318,66 M	17.88
Pemberian Pinjaman Daerah	176,02 M	0,00 M	0.00

Sumber: dashboard resmi APBD DKI Jakarta (SMART APBD / SIKD).

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidaksesuaian pencatatan, pengelolaan aset yang belum optimal, serta integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun SAP telah diterapkan secara formal, implementasinya di lapangan masih menghadapi

berbagai tantangan. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik yang dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SAP memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi. Sistem akuntansi yang baik harus didukung oleh pengelolaan yang konsisten serta sistem informasi yang terintegrasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tanpa dukungan tersebut, penerapan SAP berpotensi hanya bersifat administratif dan belum mampu memberikan dampak optimal.

Lebih lanjut, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja keuangan yang relatif baik, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sistem akuntansi, pengendalian internal, serta integrasi sistem informasi agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan mutu laporan keuangan di pemerintah daerah. Namun, keberhasilan penggunaannya sangat tergantung pada kualitas cara penerapan, dukungan sistem, serta kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Untuk itu, perlu adanya penilaian dan perbaikan yang terus-menerus agar tujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Penilaian yang lebih mendalam diperlukan untuk melihat seberapa efektif penerapan SAP di lapangan. Dengan cara ini, studi kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menampilkan suksesnya pemerintah daerah dalam meraih opini WTP, tetapi juga untuk menemukan berbagai aspek yang masih harus ditingkatkan untuk mendapatkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari studi yang telah dilaksanakan mengenai penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap mutu laporan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa secara umum, SAP telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terlihat dari pembuatan laporan keuangan yang sudah menggunakan sistem akrual, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai keadaan keuangan daerah, termasuk aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas. Dari segi mutu laporan keuangan, temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi ciri-ciri kualitas, yaitu relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dianggap mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi keuangan daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Namun, studi ini juga menemukan bahwa penggunaan SAP belum sepenuhnya efektif. Masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, seperti pengelolaan aset yang belum dilakukan dengan baik, ketidakcocokan dalam pencatatan transaksi tertentu, dan juga integrasi sistem informasi akuntansi antar organisasi perangkat daerah yang belum optimal. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara penggunaan SAP yang resmi dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, rumitnya pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan anggaran yang besar dan banyaknya bagian kerja juga menjadi masalah dalam penerapan SAP. Kerumitan ini memerlukan koordinasi yang baik, sistem yang terhubung, dan tenaga kerja yang berkualitas agar laporan keuangan dapat dijaga kualitasnya secara terus-menerus.

Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki mutu laporan keuangan di pemerintah daerah. Namun, keberhasilan penggunaan sistem ini sangat tergantung pada seberapa baik penerapannya, dukungan dari sistem informasi, serta keterampilan petugas dalam mengatur keuangan daerah. Karena itu, peningkatan mutu laporan keuangan tidak hanya memerlukan kepatuhan pada standar yang ada, tetapi juga perlu adanya perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaannya di lapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terkait SAP berbasis akrual agar pemahaman terhadap standar akuntansi dapat diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi akuntansi antar organisasi perangkat daerah secara lebih optimal. Sistem yang terintegrasi akan membantu proses pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi data keuangan menjadi lebih akurat, efektif, dan tepat waktu. Penguatan sistem pengendalian internal juga perlu terus dilakukan, khususnya dalam pengelolaan aset dan pencatatan transaksi, agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penerapan SAP di sektor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2022). Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 55–67. <https://scholar.google.com>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI. <https://jakarta.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI. <https://jakarta.bpk.go.id>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. <https://www.bpkp.go.id>
- Bastian, I. (2021). *Sistem akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat. <https://scholar.google.com>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data APBD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Fauziah, N. (2023). Implementasi SAP dan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 8(2), 112–125. <https://scholar.google.com>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat. <https://scholar.google.com>
- Harun, H. (2019). Public sector accounting reform and financial accountability in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 27(1), 62–78. <https://scholar.google.com>
- Hidayat, R., & Putri, A. (2021). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 120–130. <https://scholar.google.com>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. <https://kemendagri.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Informasi APBD dan realisasi anggaran daerah*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kurniawan, B. (2022). Evaluasi implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 33–47. <https://scholar.google.com>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. <https://scholar.google.com>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset. <https://scholar.google.com>
- Nordiawan, D. (2020). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. <https://scholar.google.com>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. <https://jakarta.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). <https://jdih.kemendagri.go.id>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pratiwi, R., & Nugraha, D. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 25(2), 99–110. <https://scholar.google.com>
- Rahmawati, S. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 145–156. <https://scholar.google.com>
- Rosita, E. N., & Rosalina, R. (2023). Pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(1). <https://scholar.google.com>
- Sari, D., & Taufik, M. (2022). Pengaruh pemahaman aparatur terhadap penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 45–56. <https://scholar.google.com>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://scholar.google.com>
- Tarigan, R., Lumban Gaol, O. K., Sihombing, K. B., Hamdani, M., Lubis, P. K. D., & Lubis, N. P. S. (2025). Analisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1). <https://scholar.google.com>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wardani, N. P., & Aripriatiwi, R. A. (2024). Transformasi sistem akuntansi publik dan tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 8(2). <https://scholar.google.com>
- Wibowo, A., & Rahmawati. (2020). Analisis penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 85–98. <https://scholar.google.com>
- Yusuf, M., & Lestari, P. (2020). Integrasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 4(2), 71–84. <https://scholar.google.com>